

Pelecehan Bahasa oleh Pejabat Diterima sebagai Kebenaran

Jakarta, Kompas

Kesewenang-wenangan dan pelecehan bahasa tidak hanya dilakukan rakyat di bawah tetapi dilakukan pula oleh pengusa di atas. Meski yang dikerjakan sama tetapi karena statusnya berbeda maka dampaknya menjadi berbeda pula. Kesewenang-wenangan berbahasa yang dilakukan rakyat akan dianggap tidak resmi, menyimpang, aneh, dan gila. Namun jika kesewenang-wenangan itu dilakukan pejabat akan diterima sebagai sesuatu yang resmi, benar, rasional, dan standar.

Dr Ariel Heryanto, pengamat sosial dan linguis dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), mengemukakan hal itu pada hari kedua Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya di Jakarta, Rabu (27/9).

IA menyebut sejumlah contoh kesewenang-wenangan dan pelecehan bahasa yang dilakukan para pejabat yang tidak dianggap sebagai suatu kelucuan tetapi suatu kebenaran, resmi dan standar. "Harga-harga disesuikan", "Ini Pancasila, itu bukan Pancasila", "Tidak Bersih Lingkungan", kata Ariel, merupakan istilah yang diterima sebagai

kebenaran sekalipun pada dasarnya itu merupakan suatu plesetan atau kesewenang-wenangan dalam berbahasa.

"Semua itu berlangsung tanpa intervensi ahli-ahli bahasa. Ini menunjukkan betapa yang diajarkan di kelas-kelas bahasa terasing dari masyarakat. Padahal rakyat tidak hanya bergulat mencari beras tetapi juga kadang-kadang *bunek* karena kerancuan omongan pejabat," ujarnya.

Ariel mengajak para pakar bahasa untuk ikut serta memberdayakan rakyat dengan mencerna bahasa yang dipergunakan dalam pernyataan-pernyataan pejabat. Pakar bahasa perlu hadir dalam pengadilan untuk menjelaskan apa arti sebenarnya "menghina dan tidak menghina pemerintah" serta "menghina dan tidak menghina rakyat".

Lebih lanjut Ariel mengatakan, sebuah sejarah panjang bisa ditulis untuk menggambarkan bagaimana kesewenang-wenangan itu dibikin, disangkal, dan kemudian dimapangkan dengan berbagai pengorbanan pihak yang dirugikan dan rezeki bagi yang diuntungkan. Pada

saat ini, tambah Ariel, nasib sejumlah warga negara dipertaruhkan karena kesewenang-wenangan pemaknaan bahasa yang tidak bisa dipisahkan kesewenang-wenangan politik.

"Sejak tahun 1989 terjadi pamen paling meriah dalam pengadilan para aktivis muda di Indonesia dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara. Ini menunjukkan betapa serius dan meluasnya makna menghina dan tidak menghina dalam berbahasa Indonesia saat ini," kata Ariel.

Menjelaskan fenomena plesetan itu sendiri, Ariel mengatakan bahwa plesetan hanya berarti apabila ada kelaziman, ada penyimpangan terhadap kelaziman itu, dan ada orang yang bisa menangkap dan menghargai hal itu sebagai suatu bentuk yang menyimpang dan lucu.

Ia membuat kategori plesetan ke dalam tiga jenis. Pertama, plesetan yang hanya menjegal suatu rangkaian tanda yang sudah lazim tanpa diikuti pembentukan suatu susunan pesan baru dari sudut kebahasaan yang terpadu secara formal. Kedua, plesetan yang menjegal suatu kelemparan atau kelaziman rang-

kaian pesan tetapi diikuti dengan terbentuknya pernyataan baru yang memiliki keterpaduan formal. Ketiga plesetan oposisi karena memberikan nalar dan acuan yang konfrontatif bertabrakan atau menjungkirbalikkan apa yang lazim dalam masyarakat.

Sementara itu Willy Koen, seorang penerjemah, dalam pertemuan itu mengemukakan sejumlah kritiknya terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut dia, kamus tidak hanya suatu kesatuan alphabetis tetapi merupakan suatu kesatuan yang sistemik. Kamus-kamus Bahasa Indonesia yang ada, kata Willy Koen, lebih merupakan daftar kata daripada suatu kesatuan yang sistemik.

Pakar Bahasa Prof Dr Soenjono Darjowidjojo mengemukakan hasil pengamatannya perkembangan bahasa seorang anak pada 12 bulan pertama kehidupannya. Ia mengatakan, dalam usia 12 bulan seorang anak sudah menunjukkan kemampuan yang baik dari segi komprehensi. Dalam banyak hal anak sudah bisa melekatkan bunyi kalimat orang dewasa pada benda atau perbuatan. (wis)